



Pendidikan Telaah Kritis Paradigma dan Problematika Perempuan di Indonesia

Ardiansyah^{1✉}, M.Syahrani Jailani², As'ad Isma³

SMA Negeri 1 Bungo Provinsi Jambi, Indonesia¹,

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia^{2,3}

e-mail : ardievakayalaassyifa@gmail.com¹, m.syahrani@uinjambi.ac.id², asadisma@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Pendidikan perempuan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan menyeluruh terhadap paradigma, kebijakan, problematika, dan perspektif Islam terkait pendidikan perempuan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui penelitian terdahulu berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, adapun teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu (1) Paradigma Masyarakat, meskipun telah terjadi kemajuan, masih ada paradigma masyarakat yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan. (2) Kebijakan Negara, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan perempuan melalui berbagai kebijakan, seperti program beasiswa, pendidikan inklusif, dan pengentasan anak putus sekolah. (3) Problematika, Perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika dalam kiprah pendidikan, termasuk akses terbatas, diskriminasi gender, peran tradisional yang membatasi, serta tantangan khusus seperti disabilitas atau kondisi sosial-ekonomi yang rendah. (4) Perspektif Islam, dalam konteks perspektif Islam, pendidikan perempuan di Indonesia dilihat sebagai bagian integral dari ajaran agama yang menghargai hak-hak, peran, dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Kesimpulan penelitian ini yakni pemerintah telah berupaya untuk mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Paradigma Dan Problematika Perempuan

Abstract

Women's education in Indonesia is a crucial aspect in social and economic development. This study aims to present a comprehensive review of the paradigm, policies, problems, and Islamic perspectives related to women's education in Indonesia. This research approach uses a literature study, where all data is taken from previous research in the form of books and scientific journals. Data collection techniques with documentation, while data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are (1) Community Paradigm, although there has been progress, there is still a community paradigm that limits women's access and participation in education. (2) State Policy, the Indonesian Government has taken steps to improve access and quality of women's education through various policies, such as scholarship programs, inclusive education, and eradication of school dropouts. (3) Problems, Women in Indonesia still face a number of problems in their educational journey, including limited access, gender discrimination, traditional roles that limit, and special challenges such as disabilities or low socio-economic conditions. (4) Islamic Perspective, in the context of the Islamic perspective, women's education in Indonesia is seen as an integral part of religious teachings that respect the rights, roles, and contributions of women in society. The conclusion of this study is that the government has made efforts to encourage increased access and quality of education for women in Indonesia.

Keywords: Education, Paradigm and Problematics of Women

Copyright (c) 2024 Ardiansyah, M.Syahrani Jailani, As'ad Isma

✉ Corresponding author :

Email : ardievakayalaassyifa@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7408>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan perempuan di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian karena pentingnya peran perempuan dalam pembangunan suatu negara. Sejak zaman kolonial hingga era modern, paradigma masyarakat terhadap pendidikan perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, masih terdapat berbagai problematika yang menghambat pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan. Selain itu, perspektif Islam juga menjadi faktor penting yang membentuk pola pikir masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masa kolonial, pendidikan bagi perempuan terbatas dan cenderung mengikuti pola pendidikan Barat yang menekankan pada pembentukan karakter domestik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah kemerdekaan Indonesia, pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan mulai berubah. Sekarang, pendidikan perempuan dianggap sebagai investasi dalam pembangunan nasional karena perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan bangsa (M.Syahrani, 2014a).

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi bruto perempuan di pendidikan dasar mencapai 98.74%, sedangkan di pendidikan menengah mencapai 103.25%. Namun, meskipun terjadi peningkatan partisipasi, masih terdapat stigma dan stereotip yang melekat pada perempuan dalam konteks pendidikan, terutama dalam pemilihan bidang studi yang dianggap lebih cocok bagi perempuan (Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2022/2023).

Pendidikan perempuan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan suatu negara. Beliau menekankan pentingnya memberikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berkembang secara maksimal dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Mohammad, 2019). Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan. Salah satu kebijakan utama adalah program wajib belajar 12 tahun yang berlaku untuk semua anak, termasuk perempuan. Selain itu, terdapat program beasiswa khusus untuk perempuan dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), anggaran untuk sektor pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan mencapai Rp 230.728,4 Miliar, dari anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan bagi perempuan (BPS 2023). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil, kesenjangan gender dalam pembagian peran domestik yang masih membebani perempuan, dan masih adanya diskriminasi gender dalam sistem pendidikan.

Meskipun terdapat kemajuan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, masih terdapat berbagai problematika yang menghambat pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan. Salah satunya adalah angka putus sekolah yang lebih tinggi di kalangan perempuan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Faktor-faktor seperti pernikahan dini, kehamilan remaja, dan beban ekonomi keluarga seringkali menjadi penyebab utama putus sekolah di kalangan perempuan. Selain itu, masih terdapat stereotip gender dalam pemilihan jurusan atau bidang studi di pendidikan tinggi. Perempuan cenderung dipandang lebih cocok untuk bidang-bidang seperti kedokteran, keperawatan, atau pendidikan, sementara bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) masih dianggap sebagai ranah yang lebih dominan bagi laki-laki.

Diskusi mengenai kesenjangan gender dalam pendidikan Islam masih dianggap sebagai isu yang relevan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan bias gender dalam komponen pendidikan Islam dan partisipasi masyarakat yang masih menunjukkan adanya ketidakadilan gender (Putra, 2014). Rasyidin mengemukakan bahwa masalah kesetaraan gender yang terus muncul disebabkan oleh salah pengertian terhadap ajaran agama dan pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat, yang mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam ruang publik (Rasyidi et al., 2021). Jika perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengejar perannya, termasuk dalam bidang pendidikan, maka mereka akan terus dianggap sebagai individu yang lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu berkembang, sehingga dianggap memiliki status yang lebih rendah daripada laki-laki. Padahal, ajaran Islam menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ajaran Islam masih dianggap lebih mementingkan laki-laki, sehingga peran perempuan seringkali diabaikan dalam struktur sosial. Hal ini menyebabkan sebagian orang berpendapat bahwa ajaran Islam hanya menguntungkan laki-laki.

Dalam perspektif Islam, pendidikan bagi perempuan dianggap sebagai suatu kewajiban dan juga hak yang harus dipenuhi. Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Nabi Muhammad saw juga memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan perempuan dan menekankan pentingnya pengetahuan bagi kaum perempuan yang tertuang dalam hadis yang artinya *"menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim"* (HR. Ibnu Majah no. 224). Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa laki-laki dan perempuan saling mendukung satu sama lain, keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Setiap individu diberi bakat dan kemampuan yang unik oleh Tuhan sesuai dengan kodratnya. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka, baik dalam hal pendidikan, mengaplikasikan pengetahuan dalam amal kebaikan, maupun berjuang untuk kepentingan agama Allah di dunia ini.

Beberapa ulama dan cendekiawan Islam menyoroti pentingnya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi perempuan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan. Dalam konteks kesetaraan gender, melalui pendekatan pemahaman ayat-ayat gender secara proporsional dan komprehensif, serta memperhatikan hubungan antara ayat-ayat yang saling terkait (Budiana, Y., & Gandara, 2021). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut pandangan mengenai kesetaraan gender perempuan dan pendidikan dalam konteks paradigma, kebijakan, problem serta perspektif pendidikan Islam, yang saat ini menjadi perdebatan hangat di berbagai lapisan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana paradigma masyarakat terhadap pendidikan perempuan, apa saja kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, apa saja problematika utama yang dihadapi perempuan dalam meraih pendidikan di Indonesia, dan bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan perempuan dan bagaimana implementasinya dalam konteks pendidikan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka. Booth, Papaioannou, dan Sutton mendefinisikan studi pustaka sebagai upaya terstruktur untuk mengumpulkan, menilai, dan menyintesis literatur yang relevan dengan fokus penelitian, dalam hal ini jumlah literatur yang diambil sebanyak 10 yang termuat dalam jurnal terakreditasi dengan terbitan 10 tahun terakhir. Pendekatan terstruktur melibatkan pengembangan protokol penelitian, penelusuran literatur yang menyeluruh, penilaian kualitas sumber, dan integrasi temuan. Studi pustaka merupakan proses sistematis dan kritis untuk merangkum pengetahuan yang ada tentang topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan riset sebelumnya, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membentuk dasar teoretis yang solid untuk penelitian yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini yang berkaitan dengan pendidikan telaah kritis paradigma dan problematika perempuan di Indonesia, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan di Indonesia

Paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan di Indonesia merupakan gambaran pola pikir dan pandangan yang berkembang di masyarakat terkait dengan pentingnya pendidikan bagi perempuan, serta peran dan posisi mereka dalam konteks pendidikan. Paradigma ini telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai budaya, dan dinamika sosial-politik di Indonesia. Pada awalnya, pendidikan bagi perempuan di Indonesia terbatas dan cenderung terpengaruh oleh nilai-nilai patriarki yang mengutamakan peran domestik bagi perempuan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin terbukanya akses pendidikan, paradigma masyarakat terhadap pendidikan perempuan mulai berubah. Pendidikan perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana untuk mempersiapkan mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi juga sebagai investasi dalam pembangunan bangsa.

Pendidikan perempuan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan suatu negara. Beliau menekankan perlunya memberikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berkembang secara maksimal dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Hakim, 2023). Pentingnya pendidikan berkualitas bagi perempuan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan.

Paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai budaya, agama, politik, dan ekonomi. Paradigma ini mencerminkan pandangan, keyakinan, dan sikap yang dominan dalam masyarakat terkait dengan peran, nilai, dan akses pendidikan bagi perempuan. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan lengkap, tinjau dari berbagai periode waktu dan faktor yang memengaruhinya:

a. Masa Kolonial

Selama masa penjajahan Belanda, pendidikan bagi perempuan di Indonesia sangat terbatas. Pendidikan lebih ditekankan untuk kaum priayi (bangsawan) dan kaum pribumi laki-laki yang dianggap lebih penting dalam memelihara kestabilan kolonial. Perempuan dianggap lebih cocok untuk peran domestik, seperti menjadi istri dan ibu rumah tangga. Paradigma masyarakat pada masa ini menekankan bahwa pendidikan perempuan tidaklah penting dan hanya diperlukan dalam konteks mendidik mereka untuk menjadi ibu yang baik.

Selama masa kolonial di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Belanda, paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan sangat dipengaruhi oleh pandangan yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan penjajahan. Pendidikan bagi perempuan dianggap tidaklah penting dan cenderung terbatas, dengan fokus yang lebih besar diberikan pada pendidikan untuk kaum laki-laki. Perempuan dianggap lebih cocok untuk peran domestik, seperti menjadi ibu rumah tangga, dan pendidikan mereka seringkali hanya difokuskan pada keterampilan rumah tangga dan moralitas (Alfarizi, R. D., Sholekhah, K. A., & Kusmawati, 2023).

Selama masa kolonial, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang membatasi akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, termasuk perempuan. Sekolah-sekolah yang ada pada masa itu umumnya didominasi oleh kaum pribumi yang terpilih, dan akses bagi perempuan sangatlah terbatas. Pendidikan yang diberikan kepada perempuan pada masa itu lebih mengutamakan keterampilan-keterampilan domestik seperti memasak, menjahit, dan mengurus rumah tangga.

b. Masa Kemerdekaan dan Era Awal Republik

Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan paradigma yang signifikan terkait dengan pendidikan perempuan. Pemerintah mulai mengakui pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai bagian

dari upaya membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Paradigma masyarakat bergeser dari pandangan yang mengesampingkan perempuan dalam pendidikan menjadi lebih inklusif, di mana pendidikan bagi perempuan dianggap sebagai investasi untuk kemajuan bangsa.

Selama masa kemerdekaan dan era awal Republik Indonesia, paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan mengalami perubahan signifikan. Pendidikan perempuan mulai diakui sebagai bagian penting dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Masyarakat mulai menyadari bahwa pendidikan perempuan bukan hanya untuk menyiapkan mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi juga sebagai investasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik bangsa (Khumaimah, 2021). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua warga negara, termasuk kaum perempuan. Pendidikan perempuan mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang baru merdeka. Pada masa ini, terjadi peningkatan jumlah sekolah-sekolah yang dibuka untuk kaum perempuan, termasuk sekolah-sekolah tingkat menengah dan tinggi. Pendidikan perempuan tidak hanya difokuskan pada keterampilan domestik, tetapi juga mulai mengarah pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, seperti pendidikan formal dan profesional.

Paradigma masyarakat tentang pendidikan perempuan mulai bergeser dari pandangan tradisional yang mengutamakan peran domestik menjadi lebih inklusif, di mana pendidikan perempuan dianggap sebagai investasi dalam pembangunan nasional. Para pemimpin nasional pada masa itu, seperti Soekarno dan Kartini, memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi kaum perempuan sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan dan kemajuan bangsa (Putri, 2021). Pada masa kemerdekaan dan era awal Republik Indonesia, pendidikan kaum perempuan mulai mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang baru merdeka, pendidikan perempuan dianggap penting untuk memajukan bangsa dan mencapai kemajuan yang lebih besar.

Pemerintah Republik Indonesia mulai membuka lebih banyak kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan dengan mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan serta mengintegrasikan pendidikan perempuan ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih luas. Pendidikan perempuan tidak lagi terbatas pada keterampilan domestik, tetapi juga mencakup pendidikan formal hingga tingkat menengah dan tinggi.

Paradigma masyarakat tentang pendidikan kaum perempuan mulai bergeser dari pandangan yang tradisional dan patriarkal menjadi lebih inklusif dan progresif. Pendidikan perempuan dianggap sebagai investasi dalam pembangunan nasional, di mana perempuan dilihat memiliki potensi untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial (Nadhif, 2022). Para pemikir dan pemimpin nasional pada masa itu, seperti Soekarno dan Kartini, memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi kaum perempuan sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Mereka menekankan pentingnya pendidikan perempuan sebagai salah satu kunci untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.

c. *Era Reformasi dan Globalisasi*

Dalam era reformasi dan globalisasi, paradigma masyarakat tentang pendidikan perempuan di Indonesia semakin berkembang. Akses pendidikan bagi perempuan semakin diperluas, dan pendidikan perempuan dianggap sebagai salah satu kunci untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Masyarakat mulai memahami bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.

Era reformasi di Indonesia, yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, ditandai dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Salah satu aspek penting dari reformasi adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk semua warga negara, termasuk kaum perempuan. Pemerintah dan masyarakat mulai mengakui bahwa pendidikan perempuan tidak hanya diperlukan untuk memajukan

bangsa, tetapi juga untuk mencapai kesetaraan gender dan mempersiapkan perempuan menghadapi tuntutan globalisasi.

Di era globalisasi, akses terhadap informasi dan teknologi semakin mudah, membuka berbagai peluang dan tantangan baru bagi pendidikan kaum perempuan. Paradigma masyarakat tentang pendidikan perempuan mulai berubah, di mana pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk identitas, kebebasan, dan partisipasi politik perempuan dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global (Dhea et al., 2021).

Dalam konteks ini, pendidikan perempuan di Indonesia semakin ditekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global, termasuk keterampilan digital, bahasa asing, dan keterampilan manajemen. Pendidikan perempuan juga diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun komunitas (Febrianti, 2024).

Kebijakan Negara Terhadap Perempuan Dalam Membangun Pendidikan

Kebijakan negara terhadap perempuan dalam membangun pendidikan merupakan refleksi dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses fisik terhadap fasilitas pendidikan hingga program-program khusus untuk mempromosikan pendidikan perempuan, mengurangi kesenjangan gender, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh perempuan. Berikut adalah penjelasan tentang kebijakan negara terhadap perempuan dalam membangun pendidikan:

a) Kebijakan Akses Pendidikan

Kebijakan akses pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang inklusif, seperti sekolah yang terjangkau, aman, dan ramah perempuan (Marzuki, 2012). Kebijakan ini juga dapat mencakup program beasiswa dan bantuan finansial bagi perempuan dari keluarga miskin untuk mendukung akses mereka ke pendidikan (Ahmad & Widdah, 2023).

b) Kebijakan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, dan hasil pendidikan antara perempuan dan laki-laki (I. Muhammad, 2014). Ini dapat mencakup program afirmasi gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Penghapusan Diskriminasi Gender melalui pembentukan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi gender, termasuk pembentukan lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual dan stereotip gender, serta pemberian pelatihan dan dukungan khusus untuk guru dan staf pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender (Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., ... & Ardiansyah, 2021).

c) Kebijakan Pendidikan Seksual

Kebijakan pendidikan seksual bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan bagi perempuan untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab tentang tubuh, kesehatan reproduksi, dan hubungan interpersonal. Ini termasuk program-program pendidikan tentang kesehatan reproduksi, penghindaran kekerasan dalam hubungan, dan pencegahan penyakit menular seksual. Langkah-langkah dalam kebijakan ini meliputi, (1) kurikulum pendidikan seksual yang terintegrasi pendidikan seksual dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan dalam hubungan. (2) pelatihan untuk Guru yaitu pelatihan diberikan kepada guru untuk menyampaikan materi pendidikan seksual dengan sensitif dan efektif (Nailil et al., 2022).

d) Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua perempuan, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan relevan. Ini mencakup (1) penyediaan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu seperti dukungan khusus untuk siswa dengan disabilitas (Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, 2022). (2) pelatihan bagi guru tentang pendidikan inklusif, serta advokasi untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi semua perempuan, serta pendidikan inklusif untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif bagi semua siswa (Josly et al., 2023).

e) Kebijakan Pengentasan Anak Putus Sekolah

Kebijakan pengentasan anak putus sekolah bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan mereka tanpa terputus. Ini mencakup program-program, (1) pemulihan dan reintegrasi bagi anak-anak putus sekolah, program ini dirancang untuk membantu anak-anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka (Josly et al., 2023). (2) dukungan finansial dan sosial bagi keluarga yang membutuhkan, serta strategi untuk mengidentifikasi dan mencegah faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah (Hardy, I., & Woodcock, 2015).

Kebijakan negara terhadap perempuan dalam membangun pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang setara, meningkatkan kesetaraan gender, dan memperkuat kualitas pendidikan yang diterima oleh perempuan. Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan memajukan hak-hak pendidikan bagi semua perempuan di Indonesia.

Problematika Perempuan Dalam Kiprah Pendidikan

Pendidikan dan perempuan di Indonesia, problematika dalam Kiprah Pendidikan. Meskipun pendidikan merupakan hak asasi yang fundamental bagi semua individu, perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika yang mempengaruhi kiprah mereka dalam dunia pendidikan. Problem-problem tersebut meliputi akses terbatas, diskriminasi gender, peran tradisional yang membatasi, dan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan. Berikut problematika perempuan dalam kiprah pendidikan di Indonesia:

a) Akses Terbatas

Meskipun akses terhadap pendidikan telah meningkat secara signifikan di Indonesia, masih banyak perempuan yang menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Faktor-faktor seperti jarak, keberagaman geografis, kemiskinan, dan norma sosial dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengakses pendidikan. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan terpencil, di mana infrastruktur pendidikan mungkin kurang berkembang (K. Muhammad et al., 2017).

b) Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender masih menjadi masalah serius dalam pendidikan di Indonesia. Perempuan seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil, baik dari institusi pendidikan maupun dari masyarakat secara umum. Ini bisa berupa diskriminasi dalam penempatan kelas, kurangnya akses terhadap peluang pendidikan yang sama, atau bahkan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Nailil et al., 2022).

c) Norma dan Peran Tradisional

Perempuan di Indonesia sering kali terjebak dalam peran tradisional yang membatasi, terutama dalam konteks keluarga dan masyarakat. Norma-norma sosial yang mengharuskan perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah tangga dapat menghambat ambisi pendidikan mereka. Dalam

beberapa kasus, perempuan bahkan mungkin dipaksa untuk menyelesaikan pendidikan mereka lebih awal untuk menikah atau mengurus keluarga (Khairunnisak, D., Lutfi, B. B., & Putra, 2023).

d) **Tantangan Khusus**

Selain masalah umum yang dihadapi oleh semua perempuan, beberapa kelompok perempuan di Indonesia juga menghadapi tantangan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Ini termasuk perempuan dengan disabilitas, perempuan yang tinggal di daerah konflik atau terpinggirkan, anak-anak perempuan dari keluarga miskin, dan perempuan dari kelompok minoritas etnis (Alifa et al., 2022).

Problem-problem yang dihadapi oleh perempuan dalam kiprah pendidikan di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan mengatasi problematika ini secara holistik, Indonesia dapat mencapai tujuan kesetaraan gender dan pendidikan yang inklusif bagi semua warga negaranya.

Pendidikan dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Islam.

Pendidikan perempuan di Indonesia, jika dilihat dari perspektif Islam, merupakan bagian integral dari ajaran agama yang mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta pandangan terhadap peran dan hak-hak perempuan dalam dunia pendidikan. Berikut penjelasan pendidikan dan perempuan di Indonesia berdasarkan perspektif Islam:

a) **Hak-Hak Pendidikan dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, pendidikan dianggap sebagai hak bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Al-Qur'an dan hadis menyatakan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran bagi umat Muslim. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

b) **Peran Gender dalam Pendidikan Menurut Islam**

Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan umat dan masyarakat melalui pendidikan. Meskipun peran gender dalam masyarakat sering kali dibatasi oleh budaya dan tradisi, ajaran Islam mendorong kesetaraan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Perempuan dalam Islam diharapkan untuk menjadi penuntut ilmu dan pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan.

c) **Pendidikan Agama dan Moral**

Pendidikan perempuan dalam Islam tidak hanya mencakup pembelajaran akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan moral yang kuat berdasarkan nilai-nilai agama. Perempuan diajarkan untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia. Pendidikan agama dan moral memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian perempuan Muslim yang berkontribusi positif bagi masyarakat.

d) **Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Bersama**

Dalam perspektif Islam, pendidikan perempuan bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat dan negara. Masyarakat dan negara diharapkan untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi pendidikan perempuan, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka (M.Syahrani, 2014b).

Pendidikan dan perempuan di Indonesia berdasarkan perspektif Islam memegang peranan penting dalam membentuk pandangan dan pendekatan terhadap pendidikan perempuan. Islam mendorong semua umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pendidikan perempuan dalam konteks Islam di Indonesia: (1) Kewajiban Menuntut Ilmu, Islam

menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa memandang jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa mencari ilmu wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. (2) Akses yang Setara, Dalam Islam, semua umat harus diberikan akses yang setara terhadap pendidikan. Ini berarti bahwa perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan seperti laki-laki. (3) Peran Perempuan dalam Masyarakat, Islam mengakui peran penting perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Dengan pendidikan yang baik, perempuan dapat berkontribusi lebih besar pada masyarakat dan keluarga, serta mendidik generasi mendatang. (4) Tokoh Perempuan dalam Sejarah Islam, Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang berperan penting dalam bidang pendidikan dan agama, seperti Aisyah RA yang dikenal sebagai cendekiawan, ahli hadits, dan ahli hukum Islam. Mereka menjadi contoh bahwa perempuan dapat memiliki peran yang besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan (N & Rizka, 2020). (5) Penghormatan terhadap Martabat Perempuan, Islam menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak perempuan. Ini termasuk hak untuk menuntut ilmu tanpa hambatan dan diskriminasi. (6) Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Agama, Banyak perempuan Indonesia yang aktif dalam pendidikan agama, termasuk sebagai guru, pendakwah, dan penulis, yang berperan dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Islam. (7) Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk memperkuat kebijakan yang memastikan akses dan kesempatan pendidikan yang sama bagi perempuan. Secara keseluruhan, Islam mendukung hak perempuan untuk menuntut ilmu dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya pengetahuan dan pendidikan untuk semua umat. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai ini.

SIMPULAN

Pendidikan perempuan di Indonesia adalah subjek yang kompleks, melibatkan banyak aspek dari paradigma masyarakat, kebijakan negara, problematika yang dihadapi, hingga perspektif Islam. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu (1) *Paradigma Masyarakat*, meskipun telah terjadi kemajuan, masih ada paradigma masyarakat yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Perubahan paradigma ini memerlukan upaya kolektif untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. (2) *Kebijakan Negara*, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan perempuan melalui berbagai kebijakan, seperti program beasiswa, pendidikan inklusif, dan pengentasan anak putus sekolah. Namun, implementasi dan pemantauan yang efektif perlu terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan bagi perempuan. (3) *Problematika*, Perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika dalam kiprah pendidikan, termasuk akses terbatas, diskriminasi gender, peran tradisional yang membatasi, serta tantangan khusus seperti disabilitas atau kondisi sosial-ekonomi yang rendah. Solusi terhadap problematika ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait. (4) *Perspektif Islam*, dalam konteks perspektif Islam, pendidikan perempuan di Indonesia dilihat sebagai bagian integral dari ajaran agama yang menghargai hak-hak, peran, dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Pendidikan perempuan didorong untuk mengembangkan karakter dan moral yang kuat berdasarkan pada nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, untuk mencapai kesetaraan gender dan pendidikan yang inklusif bagi perempuan di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan seluruh warganya secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Widdah, M. El. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 2716–3768.
- Alfarizi, R. D., Sholekhah, K. A., & Kusmawati, H. K. (2023). Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Zaman Penjajahan II. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), 257–265.
- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan. *INKLUSI. Journal of Syntax Literate*, 7(6), 234.
- Alifa, N. F., Farid, S., & Muh.Rizki, A. (2022). Kebijakan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 35.
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91.
- Dhea, S. S., Nuraini, Afrin, D. A. M., Rukma, S., & Dian, R. A. (2021). Persepsi Orang Tua Tentang Respon Emosi Anak Selama Pembelajaran Daring. *SEMDIKJAR* 4, 3(1), 436–444.
- Febrianti, E. (2024). Implikasi Globalisasi Dan Kemiskinan di Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 145.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20.
- Hardy, I., & Woodcock, S. (2015). Inclusive education policies: Discourses of difference, diversity and deficit. *International Journal of Inclusive Education*, 19(2), 141.
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., ... & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86.
- Josly, Y. T., Harol, R. L., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(2), 798–809.
- Khairunnisak, D., Lutfi, B. B., & Putra, D. P. D. (2023). Kompleksitas Kesetaraan Gender di Indonesia Menuju Era Society 5.0. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 480–486.
- Khumaimah, R. (2021). Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 183–191.
- M.Syahrani, J. (2014a). Guru Profesional dan Tantangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'lim*, 21(1), 3.
- M.Syahrani, J. (2014b). Guru Profesional dan Tantangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'lim*, 21(1), 3.
- Marzuki. (2012). Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2), 25.
- Mohammad, A. Y. S. (2019). Penerapan Kebijakan Dalam Pendidikan Islam (Studi Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan). *Jurnal TAMADUN*, 20(1), 29.
- Muhammad, I. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *EL-TARBAWI*, 7(1), 56.
- Muhammad, K., Dian, S., & Rena, L. (2017). *Manajemen Pendidikan*. CV.Budi Utama.
- N, A. M., & Rizka, A. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *ANDRAGOGI*, 2(2), 280–298.
- Nadhif, M. M. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16511–16524.
- Nailil, M., Atik, D. L., & Fatchurrohman. (2022). Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. *Citra Ilmu*, XVIII(35), 24.

- 4355 *Pendidikan Telaah Kritis Paradigma dan Problematika Perempuan di Indonesia* - Ardiansyah, M.Syahrani Jailani, As'ad Isma
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7408>
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 234.
- Putri. (2021). Implementasi Pemikiran RA. Kartini dalam Pendidikan Perempuan Pada Era Globalisasi. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 7(2), 69.
- Rasyidi, Sukarno, & Widdah, M. El. (2021). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 58.